

Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi para akademisi yang mengkritisi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Mahfud mengatakan, jika tidak menjadi menteri, dirinya juga akan mengkritisi perppu tersebut.

"Saya juga akademisi. Mungkin, saya kalau tidak jadi menteri, (akan) ngkritik kayak gitu," ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/1).

Tapi Mahfud memastikan bahwa tidak ada unsur koruptif dalam pembentukan aturan Cipta Kerja. Menurutnya, baik undang-undang (UU) maupun perppu sama-sama bertujuan mempermudah pekerjaan dan investasi.

Selain itu, Mahfud juga menggarisbawahi, secara prosedur penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak bermasalah sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.

"Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya. Itu sudah sesuai. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan

perundang-undangan yang memasukkan bahwa omnibus law itu benar. Nah sudah kan? sudah dibuat lalu dibuat perppu sesuai dengan undang-undang baru, gitu," katanya.

"Apakah perppu, apakah undang-undang pasti dikritik. Itu sudah biasa dan itu bagus. Ini demokrasi yang maju tapi kita juga kalau pemerintah menjawab itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen," ujar Mahfud lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Terbitnya Perppu ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu yang baru saja terbit diharapkan bisa menjadi implementasi dari putusan MK.

"Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini. ■ **mei**

Persilakan Sandiagra Uno Nyapres, Partai Gerindra: Lewat Partai Lain

JAKARTA (IM) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufrido Dasco Ahmad mempersilakan Sandiagra Uno mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hanya saja mekanisme itu tak bisa ditempuh melalui Partai Gerindra yang sudah memutuskan untuk mengesampingkan kembali ketua umumnya, Prabowo Subianto.

"Kalau ada kader lain yang berkeinginan maju, ya itu enggak masalah juga kalau kemudian ingin maju melalui partai lain," tutur Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1).

Dasco menegaskan, tak ada keinginan dari Prabowo dan Gerindra untuk menghalangi keinginan Sandiagra. Sebab, keinginan untuk berkontribusi dalam pilpres merupakan hak semua warga negara.

"Jadi, apa yang kita sampaikan ini sebagai bentuk penghargaan pada alam demokrasi kita. Jadi, tidak ada dari kita kemudian mau melarang apabila ada yang ingin ikut kontestasi, silakan saja,"

katanya.

"Ya tentunya tidak lewat Partai Gerindra kan gitu," kata Dasco menambahkan.

Lebih lanjut, Dasco menyiratkan agar Sandiagra angkat kaki dari Gerindra jika kekehun ingin menjadi kontestan Pilpres 2024. Pasalnya, Sandiagra harus mengikuti mekanisme dari partai politik (parpol) lain untuk mendapatkan tiket tersebut.

"Tentunya kalau sudah melalui partai lain, ya itu dia harus menjadi kader partai lain," ujarnya.

Sementara Sandiagra menyatakan bahwa dirinya masih kader Partai Gerindra. Ia tetap akan mematuhi arahan dari pimpinan parpol terkait langkah politiknya ke depan.

"Berkaitan dengan langkah-langkah politik ke depan, sebagai kader yang loyal, tentu akan saya koordinasikan dengan pimpinan. Karena Gerindra itu partai yang menaungi dan membesarkan saya," ujar Sandiagra dalam kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur, akhir Desember 2022 lalu. ■ **mei**

AKBP Bambang Kayun Penuhi Panggilan Pemeriksaan Penyidik KPK

JAKARTTA (IM) - Oknum pervira polisi, AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/1).

Bambang Kayun diperiksa sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat perkara perbatasan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia).

"Benar, hari ini (3/1) telah hadir pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait dengan pemalsuan surat perkara perbatasan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/1).

"Saat ini, tersangka telah berada dilantai 2 Gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan," katanya.

KPK menetapkan Bam-

bang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perbatasan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia).

"Benar, KPK telah memulai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perbatasan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," kata Ali Fikri.

Dia menjelaskan, Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan tersangka pihak pemberi suap merupakan pihak swasta. Hanya saja KPK belum mau membeberkan secara terang nama-nama tersangka dalam kasus ini.

Bambang Kayun diduga menerima suap dari Pasangan Suam Istri (Pasutri) Herwansyah dan Emilia Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Di mana Bambang Kayun disinyalir telah menerima uang miliaran rupiah hingga mobil mewah saat menjabat sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.

Uang miliaran rupiah hingga mobil mewah tersebut diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perbatasan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia). ■ **han**

PENGUMUMAN

Sahwa akan dilakukan pengembalian hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. SOLUSI MANAJEMEN CENDRIKA, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri "Perseroan".

Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat Ruko Suteria Niaga 1 Nomor 6, Jalan Raya Serpong, Kelurahan Paketonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Dengan tembusan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 67, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kota Tangerang Selatan, 4 Januari 2023

Direksi Perseroan

Catatan: rancangan pengembalian dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.

Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN KERJA WAMENKUMHAM DI KANTOR IMIGRASI PEMALANG

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kanan) didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang Arvin Gumilang (kedua kiri) meninjau sarana prasarana di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pematang, Jawa Tengah, Selasa (3/1). Kunjungan kerja Wamenkumham tersebut untuk mengecek pelayanan, fasilitas dan sarana prasarana sehingga mampu meningkatkan profesionalisme untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

PPKM telah Dicabut, Pemerintah Janji Lanjutkan Bansos hingga Insentif Pajak

Selain pemberian bansos, salah satu program pemerintah yang tetap dilanjutkan pada tahun ini adalah insentif pajak, meski PPKM telah dicabut.

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai. Namun, Pemerintah berjanji tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) pada 2023.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, bantuan sosial seperti obat-obatan akan tetap tersedia pada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang terintegrasi dengan program pemerintah.

"Bansos akan dilanjutkan

di tahun 2023. Bantuan sosial, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk," kata Wempi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencabutan PPKM secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kemendagri, Senin (2/1) kemarin.

Salah satu program pemerintah yang tetap dilanjutkan pada tahun ini adalah insentif pajak.

"Dan beberapa insentif-insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan," kata Wempi.

Wempi pun meminta seluruh faskes tetap siaga

mengoptimalkan fasilitas dan tenaga kesehatan yang dimiliki. Vaksinasi terutama dosis penguat (booster) supaya tetap berlangsung meski PPKM dicabut.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai risiko penularan virus corona (Covid-19), meskipun aturan PPKM telah dicabut Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi menghentikan PPKM mulai 30 Desember 2022. Jokowi ber alasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Kepala Negara menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian *bed occupancy rate* 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

Seleksi Calon Komisioner untuk 24 Provinsi dan 317 Kabupaten, KPU: Ini Tugas Berat

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan seleksi calon komisioner KPU untuk 24 provinsi dan 317 kabupaten/kota pada tahun ini. Hal ini imbas masa jabatan para komisioner KPU provinsi dan kota/kabupaten yang akan habis.

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima mengatakan, jadwal seleksi tidak serentak di satu waktu pada tahun ini. Seleksi sebanyak itu disebut menjadi tugas berat bagi penyelenggara pemilu, sebab tahun ini tahapan-tahapan krusial Pemilu 2024 juga akan berlangsung.

"Ini waktunya tidak bersamaan, nah ini tentu juga mengurangi energi kami, sementara kami harus menyiapkan tahapan pemilu," ujar Wima dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (3/1).

"Kemudian kita juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan dalam tahapan pemilu itu di 2023 dan 2024, kami juga harus melaksanakan seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota," kata Wima menambahkan.

Sementara itu, pada 2024, KPU akan melangsungkan seleksi untuk jajaran di 9 provinsi dan 196 kota/kabupaten, bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

KPU menyoroti potensi konflik yang cukup tinggi akibat serentaknya seleksi anggota KPU daerah, penyelenggaraan pemilu, serta persiapan Pilkada 2024.

"Seleksi ini juga termasuk potensi konfliknya tinggi, ini juga harus kita selesaikan. Oleh karena itu, kita mohon bantuan pmda untuk menjaga kondusifitas dan keamanan pelaksanaan seleksi ini. Nanti

teman-teman KPU provinsi dan kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan pmda," kata Wima.

Rekrutmen anggota KPU daerah yang bervariasi ini imbas tak diakomodirnya usulan KPU RI agar pergantian masa jabatan KPU daerah dilakukan serentak, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, menurut Wima, dalam konsinyering substansi draf Perppu Pemilu bersama pemerintah dan DPR, KPU telah mengusulkan agar pergantian anggota KPU daerah diseragamkan pada 2025. Usulan ini mentah, lalu forum disebut menyepakati penyeragaman akhir masa jabatan KPU daerah pada 2023.

Namun, pada akhirnya, dalam Perppu Pemilu yang ditekankan Jokowi, kebijakan tersebut tidak dimasukkan. ■ **han**



PERTEMUAN KPU DENGAN PP MUHAMMADIYAH

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri) saat melakukan pertemuan di PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (3/1). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah

memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. ■ **han**

KPK Bidik Oknum Pencari Dana Lewat Jalur Gelap untuk Amunisi Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau aktor-aktor politik yang mencari dana lewat jalur gelap atau ilegal untuk modal di Pemilu 2024.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufroon mengatakan, pihaknya sudah mulai memantau aktivitas para politikus menjelang kontestasi politik 2024.

"Karena momen politik sedang membutuhkan banyak dana untuk amunisi politik," kata Nurul Ghufroon melalui pesan singkatnya, Selasa (3/1). "Sehingga, semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formal padahal substansinya disimpangi," ujarnya.

Berdasarkan catatan KPK, tahun-tahun menjelang pemilu memang rawan tindak pidana

korupsi. Sejumlah dana atau anggaran negara mulai 'dimainkan' oleh para koruptor. Modusnya, kata Ghufroon, tak jauh berbeda, seperti penyelenggaraan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa, seleksi pejabat, perijinan bahkan sampai pada bantuan-bantuan yang disalahgunakan," beber Ghufroon.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, KPK memberikan peringatan keras kepada para politikus yang akan ikut kontestasi politik 2024. KPK mengingatkan untuk jauh-jauh dari praktik korupsi.

"Sebab, KPK pun telah mempersiapkan kewaspadaan untuk memberantas korupsi secara profesional tegas dan akuntabel. KPK berharap tahun 2025 ini tidak merupakan tahun korupsi, tapi tahun politik etis berintegritas tanpa korupsi," katanya. ■ **mei**

KPK Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Tersangka Pembobol Rumah Kasatgas Penuntutan

JAKARTA (IM) – Polisi telah menangkap dua tersangka pembobol rumah kasatgas penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya ditangkap di Jakarta pada Senin (2/1). Kedua tersangka langsung di bawa ke Yogyakarta.

KPK mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian dalam menangani kasus pembobolan di rumah jaksa berinisial FAN. Selanjutnya, KPK menyerahkan sepenuhnya proses hukum dua terduga pelaku pembobolan rumah jaksa FAN ke pihak kepolisian.

"Tentu KPK apresiasi pihak kepolisian setempat yang berhasil menangkap terduga pelaku pencurian di rumah pegawai KPK dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (3/1).

"Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak kepolisian," pungkasnya.

Diketahui, rumah salah satu jaksa KPK berinisial FAN, yang berada di wilayah Kemantren, Kecamatan Wi-

robajan, Kota Yogyakarta, dibobol maling pada Sabtu, 24 Desember 2022 lalu. Tas berisi laptop dan berkas-berkas penting dibawa kabur maling tersebut.

Aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui dari rekan istri FAN, berinisial NN sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu NN hendak mengantar paket ke rumah FAN, namun ia sangat terkejut ketika melihat pintu rumah rekan-nya terbuka. Apalagi kondisi rumah korban dalam keadaan acak-acakan.

Ali mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim ke Yogyakarta untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Tak hanya itu, kata Ali, tim yang diterjunkan KPK juga telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait peristiwa tersebut.

"Empat personel Tim Unit Reaksi Cepat KPK sebelumnya juga telah dikirim ke Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap pegawai dan termasuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat," katanya. ■ **lus**

mandiri
PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.
CV. Gemah Ripah/ Hero Tahler (Direktur)
Di tempat

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Ade Suryatini, SH., Mkn No. 35 tanggal 30 Desember 2022 dan Perjanjian Kredit Tambahan No. 30/195a/MK tanggal 06 Juni 1989 serta Perjanjian Kredit No. 30/295/MK tanggal 24 Oktober 1989 Bank Dagang Negara Cabang Bogor yang saat ini menjadi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara dengan nomor rekening 1330100004464 dan 1330100004456 per tanggal 19 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 582.906.301,00 (terbilang lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus satu rupiah).

2. Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara, maka pada tanggal 30 Desember 2022, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas Kredit Saudara berikut dokumen yang terhubungkan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditur baru sbb:

- Nama : Adhityo Kuncoro
- Alamat : Jl. Intan 4 Blok V No. RT.07/03 RW.007, Kel. Batuceper, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang

Dengan telah beralihnya piutang tersebut maka selanjut dan/atau seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.

Jakarta, 04 Januari 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V